Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 34124-34136

Relasi Aktor Politik dan Institusi dalam Tata Kelola Pembangunan Daerah: Sebuah Studi Literatur

Ikhwan Naufal Fiqri[1], Nora Eka Putri[2], Lince Magriasti[3]
[1,2,3] Universitas Negeri Padang
e-mail: ikhwan.naufal402@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi aktor politik dan institusi dalam tata kelola pembangunan daerah serta mengidentifikasi bagaimana dinamika kekuasaan memengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap kualitas tata kelola pembangunan yang tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh interaksi antara kepentingan politik, kelembagaan, dan distribusi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Data diperoleh melalui penelusuran dan seleksi sumber ilmiah berupa artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema penelitian dan dipublikasikan pada periode terkini. Analisis dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antaraktor, peran institusi, serta implikasi relasi kekuasaan dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara aktor politik dan institusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan prioritas pembangunan, efektivitas implementasi kebijakan, serta tingkat partisipasi dan akuntabilitas publik. Dominasi kepentingan politik berpotensi menurunkan kualitas tata kelola apabila tidak diimbangi dengan kapasitas institusional dan mekanisme pengawasan yang memadai. Sebaliknya, hubungan yang lebih kolaboratif dan tata kelola yang inklusif dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan dimensi politik, institusi, dan tata kelola pembangunan.

Kata kunci: aktor politik, institusi, relasi kekuasaan, tata kelola pembangunan, studi literatur

ABSTRACT

This research aims to analyze the relationship between political actors and institutions in regional development governance and identify how power dynamics influence the formulation and implementation of development policies. This study is motivated by increasing attention to the quality of development governance, which is determined not only by administrative capacity but also by the interaction between political interests, institutions, and the distribution of power in the decision-making process. The research employed a qualitative approach using a literature review. Data were obtained through the search and selection of scientific sources, including journal articles, academic books, and policy documents relevant to the research theme and published in the current period. The analysis was conducted using thematic analysis to identify patterns of relationships between actors, the role of institutions, and the implications of power relations in regional development. The results indicate that the relationship between political actors and institutions has a significant influence on the determination of development priorities, the effectiveness of policy implementation, and the level of public participation and accountability. The dominance of political interests has the potential to undermine the quality of governance if not balanced by adequate institutional capacity and oversight mechanisms. Conversely, more collaborative relationships and inclusive governance can support more responsive and sustainable regional development. This research contributes to strengthening understanding of the interrelationships between politics, institutions, and development governance.

Keywords: political actors, institutions, power relations, development governance, literature study

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tata kelola pembangunan daerah berkembang menjadi salah satu isu strategis dalam kajian politik dan administrasi publik seiring meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan kontemporer, keberhasilan pembangunan tidak lagi dipahami hanya sebagai hasil dari kapasitas pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh pola hubungan antara aktor politik, institusi, dan distribusi kekuasaan yang membentuk proses pengambilan keputusan publik. Perkembangan kajian tata kelola menunjukkan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan interaksi politik, sosial, dan kelembagaan dalam menentukan arah pembangunan daerah (Lathifah et al., 2024).

Secara konseptual, tata kelola pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme administratif dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Tata kelola pembangunan mencerminkan proses koordinasi berbagai aktor yang memiliki sumber daya, kewenangan, dan kepentingan yang berbeda dalam menentukan prioritas pembangunan. Pendekatan multilevel governance menjelaskan bahwa pembangunan berlangsung melalui hubungan yang saling bergantung antarlevel pemerintahan dan institusi sehingga kualitas hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh pola interaksi tersebut (Cahyono, 2026).

Dalam praktiknya, implementasi tata kelola pembangunan daerah menunjukkan dinamika yang semakin kompleks setelah penguatan desentralisasi dan perluasan kewenangan pemerintah daerah. Di satu sisi, desentralisasi membuka ruang bagi pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga memperbesar kemungkinan terbentuknya relasi kekuasaan yang memengaruhi proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Kajian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi, kualitas koordinasi antarpemerintah, serta kemampuan aktor publik dalam membangun partisipasi masyarakat (Lathifah et al., 2024).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa relasi antara aktor politik dan institusi dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda terhadap kualitas tata kelola pembangunan. Interaksi yang bersifat kolaboratif cenderung mendorong peningkatan efektivitas kebijakan dan memperluas keterlibatan masyarakat, sedangkan dominasi kepentingan politik tertentu berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas dan menggeser orientasi pembangunan dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok tertentu. Penelitian mengenai peran elite lokal menunjukkan bahwa pembangunan daerah semakin dipengaruhi oleh jaringan kolaboratif yang melibatkan aktor politik formal dan informal dalam proses pengambilan keputusan (Fonataba, 2025).

Untuk menjelaskan fenomena tersebut secara lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga perspektif utama. Perspektif governance digunakan untuk menjelaskan pola hubungan dan koordinasi antaraktor dalam penyelenggaraan pembangunan. Perspektif institusional digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur, aturan, dan kapasitas kelembagaan memengaruhi proses pembangunan. Sementara itu, perspektif relasi kekuasaan digunakan untuk memahami bagaimana distribusi pengaruh dan kepentingan membentuk arah kebijakan serta menentukan hasil pembangunan yang dihasilkan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara tata kelola pembangunan, kapasitas institusi, dan dinamika politik. Penelitian terdahulu banyak menekankan pengaruh tata kelola terhadap hasil pembangunan, efektivitas kebijakan, maupun kapasitas institusi dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan daerah (PASILA, 2025). Penelitian lain menyoroti pentingnya koordinasi kelembagaan dan kapasitas pemerintah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Mozin & Daud, 2025). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas aspek politik, kelembagaan, dan pembangunan secara terpisah sehingga belum banyak kajian yang menyusun sintesis secara khusus mengenai hubungan aktor politik, institusi, dan dinamika kekuasaan dalam tata kelola pembangunan daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diperhatikan. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada evaluasi hasil pembangunan dan efektivitas tata kelola, sedangkan kajian yang mengintegrasikan relasi aktor politik, institusi, dan distribusi kekuasaan dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang menyusun sintesis temuan empiris secara komprehensif melalui pendekatan studi literatur juga belum banyak dilakukan pada konteks pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana relasi aktor politik dan institusi dalam tata kelola pembangunan daerah?; (2) Bagaimana dinamika kekuasaan memengaruhi proses tata kelola pembangunan daerah?; dan (3) Bagaimana implikasi relasi aktor politik dan institusi terhadap kualitas tata kelola pembangunan daerah?. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian politik dan tata kelola pembangunan serta menghasilkan sintesis konseptual yang dapat menjadi dasar penguatan pembangunan daerah yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PENELITAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Literature Review. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena berdasarkan analisis data yang bersifat kontekstual (Levitt et al., 2018), sedangkan literature review merupakan metode yang

digunakan untuk menelaah dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu topik penelitian(Snyder, 2019). Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, buku akademik, dan publikasi yang relevan dengan relasi aktor politik, institusi, kekuasaan, dan tata kelola pembangunan daerah. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar dan jurnal nasional maupun internasional terindeks dengan menggunakan kata kunci seperti political actors, institutions, power relations, development governance, dan regional development. Untuk menjaga relevansi dan kebaruan kajian, literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam tiga tahun terakhir (2024–2026). Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, tujuan penelitian, serta keterkaitan dengan fokus kajian, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses identifikasi, klasifikasi, pengelompokan, dan sintesis temuan untuk memperoleh gambaran mengenai pola relasi aktor politik dan institusi dalam tata kelola pembangunan daerah, dinamika kekuasaan yang memengaruhi proses pembangunan, serta implikasinya terhadap kualitas tata kelola pembangunan. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian menggunakan sumber ilmiah yang relevan dan kredibel serta menyajikan hasil kajian dalam bentuk uraian naratif yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Aktor Politik dan Institusi dalam Tata Kelola Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil kajian literatur, relasi antara aktor politik dan institusi menunjukkan peran yang sangat menentukan dalam membentuk tata kelola pembangunan daerah. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi juga oleh pola interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam kajian tata kelola kontemporer, pembangunan dipahami sebagai proses yang melibatkan interaksi antara kekuasaan politik, struktur kelembagaan, dan mekanisme koordinasi dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif (Karim & Alhasni, 2026). Proses tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan mengalami pergeseran dari pendekatan birokratis menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis relasi antaraktor.

Susanti et al., (2025) menjelaskan bahwa perkembangan tata kelola modern menunjukkan meningkatnya hubungan antarlembaga dan antartingkat pemerintahan dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan multilevel governance, pembangunan dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aktor yang memiliki kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Temuan tersebut diperkuat oleh Wulandjani et al., (2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola modern semakin bergerak menuju model koordinasi

multipihak yang menempatkan hubungan antaraktor sebagai faktor utama dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan pembangunan.

Kajian lain menunjukkan bahwa institusi memiliki peran penting sebagai mekanisme yang mengatur hubungan antaraktor politik dalam pembangunan daerah. Institusi tidak hanya berfungsi sebagai struktur administratif, tetapi juga sebagai seperangkat aturan dan mekanisme yang mengendalikan proses distribusi kewenangan, menentukan batas intervensi politik, dan menjaga keberlanjutan kebijakan pembangunan. Mendrofa et al., (2025) menjelaskan bahwa kualitas institusi berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga efektivitas pengelolaan publik, sedangkan Rifandini, (2022) menunjukkan bahwa perubahan norma dan tata kelola kelembagaan dapat membentuk pola hubungan baru antaraktor dalam proses pembangunan.

Dari perspektif hubungan politik, aktor politik memiliki posisi strategis dalam menentukan agenda pembangunan melalui proses perumusan kebijakan dan penetapan prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, keterlibatan aktor politik yang terlalu dominan berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembangunan apabila tidak diimbangi dengan kapasitas institusional yang memadai. Nasution et al., (2025) menjelaskan bahwa kompetisi politik memiliki pengaruh terhadap efektivitas hubungan antara manajemen publik dan hasil pembangunan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa institusi berperan sebagai mekanisme pengendalian agar pembangunan tetap berjalan sesuai kepentingan publik.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa relasi antara aktor politik dan institusi dapat menghasilkan pola hubungan yang berbeda. Pada beberapa kasus, hubungan tersebut berkembang dalam bentuk kolaboratif yang ditandai dengan koordinasi yang kuat dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan. Namun pada kondisi lain, hubungan tersebut cenderung bersifat dominatif ketika terdapat aktor tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap penentuan kebijakan pembangunan dibandingkan institusi yang ada. Izabel & Kuswanto, (2025) menjelaskan bahwa kualitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi menjaga keseimbangan distribusi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Dari sisi implementasi pembangunan, penguatan relasi institusional terbukti mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan memperluas ruang partisipasi dalam proses pembangunan daerah. Institusi yang memiliki kapasitas adaptif cenderung lebih mampu menyelaraskan berbagai kepentingan politik sehingga kebijakan pembangunan dapat berjalan secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Andi & Didi, (2026) menunjukkan bahwa institusi yang mampu membangun jejaring koordinasi dan integrasi kebijakan cenderung menghasilkan implementasi pembangunan yang lebih efektif dibandingkan institusi yang bekerja secara terfragmentasi.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa dinamika relasi aktor dan institusi juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan pembangunan yang semakin kompleks. Kebutuhan terhadap pembangunan yang responsif mendorong institusi untuk membangun pola koordinasi yang lebih fleksibel dan tidak lagi bergantung pada pendekatan hierarkis semata. Oktoyoki & Paulina, (2026)) menjelaskan bahwa tata kelola adaptif menjadi pendekatan yang semakin penting dalam menghadapi kompleksitas hubungan antaraktor dan perubahan lingkungan kebijakan.

Selain itu, pembangunan daerah juga menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kebutuhan pembangunan. Nurjaman, (2026) menjelaskan bahwa dalam praktik pembangunan daerah, distribusi sumber daya dan prioritas kebijakan sering dipengaruhi oleh konfigurasi politik lokal sehingga kualitas institusi menjadi faktor penting dalam menjaga orientasi pembangunan tetap berpihak pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa relasi aktor politik dan institusi merupakan elemen utama dalam tata kelola pembangunan daerah. Hubungan tersebut tidak hanya menentukan proses pengambilan keputusan, tetapi juga memengaruhi efektivitas implementasi, kualitas koordinasi, dan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan institusi yang kuat serta pola hubungan politik yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan aktor dan tujuan pembangunan publik.

Dinamika Kekuasaan dalam Proses Tata Kelola Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil kajian literatur, dinamika kekuasaan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap proses tata kelola pembangunan daerah. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh distribusi pengaruh, posisi aktor, serta kemampuan menentukan agenda pembangunan (Oktorina et al., 2025). Dalam kajian tata kelola kontemporer, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan aktor untuk memengaruhi proses kebijakan, mengarahkan distribusi sumber daya, dan menentukan prioritas pembangunan melalui mekanisme formal maupun informal (Nasyirudin, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah merupakan proses politik yang tidak terlepas dari interaksi kepentingan antaraktor dan struktur kelembagaan.

Berdasarkan berbagai penelitian yang dipublikasikan pada periode 2024–2026, pola dinamika kekuasaan yang paling banyak ditemukan dalam tata kelola pembangunan daerah meliputi dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan, distribusi kewenangan antarlembaga, kompetisi kepentingan dalam penetapan prioritas pembangunan, serta meningkatnya kebutuhan terhadap penguatan mekanisme akuntabilitas publik (Suwarno, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa

efektivitas pembangunan semakin dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola hubungan kekuasaan secara lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan pembangunan (Handini et al., 2025)

Distribusi kekuasaan dalam pembangunan daerah memiliki pengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan kualitas hasil pembangunan. Daerah yang memiliki keseimbangan antara kapasitas institusi dan pengaruh politik cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Arifin, 2024). Temuan tersebut diperkuat oleh (Asyhabie et al., 2025) yang menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang terkelola dengan baik mampu meningkatkan kualitas koordinasi pembangunan serta memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Kajian lain menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan sering muncul melalui proses penentuan agenda pembangunan. Aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik dan kelembagaan umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menentukan arah pembangunan dibandingkan aktor lain. Dalam kondisi tertentu, dominasi aktor tertentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan distribusi manfaat pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat (Sentanu, 2026).

Abdullah et al., (2026) menjelaskan bahwa perkembangan tata kelola modern menunjukkan pergeseran distribusi kekuasaan dari pola yang bersifat hierarkis menuju pola yang lebih tersebar melalui koordinasi antarlembaga dan keterlibatan berbagai aktor pembangunan. Perubahan tersebut menghasilkan ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses pembangunan, namun pada saat yang sama meningkatkan kebutuhan terhadap institusi yang mampu menjaga efektivitas koordinasi dan konsistensi kebijakan. Temuan serupa juga dijelaskan oleh Susanti et al., (2025) yang menekankan bahwa pembangunan modern semakin bergantung pada kapasitas institusi dalam mengelola hubungan antaraktor.

Dari perspektif kelembagaan, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk memengaruhi keputusan, tetapi juga sebagai kemampuan membentuk aturan, menentukan prioritas, serta mengendalikan implementasi kebijakan pembangunan. Institusi berfungsi sebagai instrumen yang membatasi dominasi kepentingan politik sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan tetap berjalan sesuai tujuan publik (Nasyirudin, 2025). Penelitian Anwar & Hanim, (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas institusi memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan daerah dalam mempertahankan efektivitas pembangunan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap pembangunan daerah. Pada beberapa kasus, distribusi kekuasaan yang lebih terbuka terbukti mampu memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan legitimasi pembangunan (Amelia,

2025). Sebaliknya, konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar berpotensi mengurangi transparansi dan mempersempit ruang pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (Adriadi et al., 2025).

Huda et al., (2026) menemukan bahwa pembangunan daerah yang berhasil umumnya ditopang oleh kemampuan pemerintah dalam membangun koordinasi serta menciptakan keseimbangan hubungan antaraktor yang memiliki tingkat pengaruh berbeda. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola dinamika politik yang berkembang selama proses implementasi.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa perubahan lingkungan pembangunan yang semakin kompleks menyebabkan dinamika kekuasaan menjadi lebih cair dan tidak lagi sepenuhnya terkonsentrasi pada aktor formal pemerintahan. Keterlibatan masyarakat, organisasi sosial, sektor swasta, dan berbagai kelompok kepentingan menciptakan pola hubungan yang lebih terbuka dan memperluas proses negosiasi dalam pembangunan (Nasyirudin, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola pembangunan saat ini bergerak menuju pola yang lebih kolaboratif dan berbasis jejaring.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan memiliki pengaruh yang besar terhadap tata kelola pembangunan daerah. Distribusi pengaruh, kapasitas institusi, mekanisme koordinasi, dan kemampuan mengelola kepentingan menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, tata kelola pembangunan yang berkelanjutan memerlukan institusi yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan sehingga pembangunan tetap berjalan secara partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Implikasi Relasi Aktor Politik dan Institusi terhadap Kualitas Tata Kelola Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil kajian literatur, relasi antara aktor politik dan institusi memberikan implikasi yang signifikan terhadap kualitas tata kelola pembangunan daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola hubungan politik dan memastikan proses pembangunan berlangsung secara akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Karim & Alhasni, 2026). Dalam konteks tata kelola pembangunan modern, hubungan yang seimbang antara aktor politik dan institusi menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan (Novita et al., 2025).

Nasyirudin, (2025) menjelaskan bahwa institusi yang mampu mengelola relasi politik secara efektif cenderung menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kualitas tata kelola meningkat ketika institusi tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengendalian terhadap distribusi pengaruh dalam proses pembangunan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara kapasitas politik dan kapasitas kelembagaan.

Kajian lain menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pembangunan berkaitan erat dengan kemampuan institusi dalam membangun koordinasi dan menjaga konsistensi kebijakan pembangunan. Iksan, (2026) menjelaskan bahwa koordinasi yang kuat antaraktor mampu mengurangi fragmentasi kebijakan dan memperkuat integrasi tujuan pembangunan di berbagai level pemerintahan. Dalam kondisi tersebut, relasi yang bersifat kolaboratif menghasilkan proses pembangunan yang lebih terarah dan efisien.

Dari sisi partisipasi publik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa relasi aktor politik dan institusi yang lebih terbuka cenderung meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Darlina et al., (2025) menemukan bahwa pembangunan yang didukung mekanisme partisipatif menghasilkan tingkat legitimasi yang lebih tinggi karena masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola tidak hanya diukur dari capaian pembangunan, tetapi juga dari kualitas proses yang dilaksanakan.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan yang terlalu didominasi oleh aktor politik dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap kualitas tata kelola pembangunan. Ketika proses pembangunan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dibandingkan pertimbangan kelembagaan, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang konsisten dan sulit mempertahankan keberlanjutan implementasi (Kasmawanto, 2025). Dalam kondisi tersebut, institusi sering mengalami penurunan kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kebijakan.

Prestianawati et al., (2025) menjelaskan bahwa kualitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas politik dan stabilitas kelembagaan. Institusi yang adaptif cenderung lebih mampu menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan kebutuhan pembangunan tanpa kehilangan orientasi terhadap tujuan publik. Sebaliknya, institusi yang lemah lebih rentan terhadap intervensi politik dan perubahan arah kebijakan yang tidak konsisten.

Temuan lain menunjukkan bahwa relasi aktor politik dan institusi juga memengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Maulida et al., (2025) menjelaskan bahwa tata kelola yang didukung distribusi kewenangan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat cenderung menghasilkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh keterbukaan proses dan kemampuan institusi dalam mempertanggungjawabkan kebijakan.

Dari perspektif efektivitas pembangunan, beberapa penelitian menegaskan bahwa hubungan yang lebih kolaboratif antara aktor politik dan institusi memungkinkan terciptanya pengelolaan sumber daya

yang lebih efisien serta memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons tantangan pembangunan yang semakin kompleks (Novita et al., 2025; Wijaya, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan yang berkualitas membutuhkan integrasi antara kapasitas politik, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme koordinasi yang efektif.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa implikasi relasi aktor politik dan institusi terhadap kualitas tata kelola pembangunan daerah bersifat sangat menentukan. Hubungan yang seimbang dan kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat akuntabilitas, memperluas partisipasi, dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, relasi yang didominasi kepentingan politik berpotensi menurunkan kualitas tata kelola dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan institusi dan pengelolaan relasi politik menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi aktor politik dan institusi dalam tata kelola pembangunan daerah, memahami dinamika kekuasaan yang memengaruhi proses pembangunan, serta mengidentifikasi implikasi hubungan tersebut terhadap kualitas tata kelola pembangunan. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antara aktor politik dan institusi dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Relasi yang bersifat kolaboratif dan didukung oleh institusi yang kuat cenderung menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Distribusi pengaruh antaraktor, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan institusi dalam mengelola kepentingan politik menjadi faktor yang menentukan kualitas proses pembangunan. Ketika relasi kekuasaan dikelola secara seimbang melalui mekanisme kelembagaan yang jelas, pembangunan cenderung berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, dominasi kepentingan politik yang tidak diimbangi penguatan institusi berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan, mempersempit ruang partisipasi, dan melemahkan kualitas tata kelola pembangunan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kualitas tata kelola pembangunan daerah berkaitan erat dengan kemampuan institusi dalam menjaga koordinasi antaraktor, memperkuat akuntabilitas, serta menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Relasi yang seimbang antara aktor politik dan institusi tidak hanya meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi pembangunan dan keberlanjutan hasil pembangunan daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya kajian politik dan tata kelola pembangunan, khususnya terkait hubungan antara aktor politik, institusi, dan distribusi kekuasaan dalam konteks pembangunan daerah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris dengan pendekatan studi kasus pada wilayah tertentu atau menggunakan metode komparatif antar daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai variasi relasi politik dan kelembagaan dalam praktik tata kelola pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. T., Sos, S., & AP, M. (2026). Inovasi Sektor Publik: Teori, Paradigma, dan Praktiknya dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern. PT Bukuloka Literasi Bangsa.

Adriadi, R., IP, S., & IP, M. (2025). POLITIK DAN KEKUASAAN "Fenomena Bossisme Lokal di Era Otonomi Daerah." UMB Press.

Amelia, D. M. (2025). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas. Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 15–23.

Andi, A. T., & Didi, L. (2026). Dinamika Koordinasi Antar-Lembaga dalam Implementasi Program Nasional Tiga juta Rumah studi di Buton Selatan. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 5(3), 6308–6319.

Anwar, C., & Hanim, Z. (2025). Pengembangan Kapasitas Lembaga (Strategi dan Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Sistem Layanan dan Kelembagaan).

Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentraliasi Asimetris. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 18(2), 208–235.

Asyhabie, A., Reinohaadi, R., Maulana, H. S., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Kompleksitas Kelembagaan Negara Indonesia: Tinjauan Literatur Terhadap Struktur, Fungsi, Dan Koordinasi Organisasi Pemerintahan. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1309–1313.

Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. Journal of Law, Policy, and Governance, 1(1), 14–19.

Darlina, N., Prianti, N., Marsidin, S., & Irsyad, I. (2025). PENGARUH PARTISIPASI STAKEHOLDER TERHADAP KUALITAS KEPUTUSAN KEBIJAKAN SEKOLAH. Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah, 10(4), 2203–2213.

Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1376–1395.

Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(5), 964–986.

Huda, A. I., Faqih, M., & Afandi, M. D. (2026). Memahami Pendekatan Pembangunan Wilayah (Regional): Dari Pembangunan Sektoral ke Pembangunan Lokal. GREAT: Journal of Global Economic Trends, 1(1).

Iksan, M. S. (2026). TRANSFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: Sistem, Tantangan, dan Strategi Menuju Pembangunan Berkelanjutan. PENERBIT KBM INDONESIA.

Izabel, T., & Kuswanto, R. (2025). Implikasi Tata Kelola Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen: Bukti Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan di Indonesia. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8(3), 1380–1394.

Karim, D. F., & Alhasni, R. A. (2026). ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Teori, Proses dan Implementasi dalam Pembangunan Nasional). CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA.

Kasmawanto, Z. (2025). Dinamika Konflik Politik di Desa: Proses dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pemerintahan. Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 17(1), 240–253.

Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Transformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia dan implikasinya terhadap stabilitas pemerintahan daerah di era globalisasi. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 11(2), 577–584.

Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. American Psychologist, 73(1), 26.

Maulida, F., Yulianto, A. A., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. A. T. (2025). Etika Dan Akuntabilitas Dalam Sistem Desentralisasi Indonesia. Journal de Facto, 12(1), 80–100.

Mendrofa, H. P., Supriadi, B., Yustiari, S. H., Lubis, A. F., & Khairunnisa, M. (2025). Analisis efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(1), 537–545.

Mozin, S., & Daud, F. (2025). Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan: Sinergi Multi-Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Produksi Padi. Indojurnal.Com. http://indojurnal.com/index.php/jisoh/article/view/338

Nasution, K., Nasution, M. A., Rustiyana, R., Rachim, A., Baskoro, S. E., Reynilda, R., Devianty, T., Nampira, R. A., Lumbanraja, V., & Vidiastuti, D. P. (2025). Kebijakan Publik Dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, dan Akuntabilitas. Star Digital Publishing.

Nasyirudin, M. (2025). Sosiologi Pemerintahan. CV Eureka Media Aksara.

Novita, A. A. A., AP, S., & AP, M. (2025). Governance for sustainable development. Selaras Media Kreasindo.

Nurjaman, A. (2026). Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia. UMMPress.

Oktorina, R., Hapsari, A., & Zulkifli, M. (2025). TRANSFORMASI TATA KELOLA KPBU DALAM DINAMIKA PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA. AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(02), 227–249.

Oktoyoki, H., & Paulina, M. (2026). Rekonfigurasi Tata Kelola Perhutanan Sosial Berbasis Adaptive Governance untuk Memperkuat Resiliensi Sosial Ekologis di Lanskap Hutan Tropis: Reconfiguring Social Forestry Governance through Adaptive Governance to Strengthen Social Ecological Resilience in Tropical Forest Landscapes. Foreco: Jurnal Kehutanan Dan Lingkungan, 1(1), 13–25.

PASILA, H. (2025). PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN TATA KELOLA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI LIMA NEGARA ASEAN PERIODE 2000-2023= THE EFFECT OF. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/52719/

Prestianawati, S. A., Akmal, A. K., Muhammad Fawwaz, S. E., Viphindrartin, S., Rasli, A., Zainuri, M. S., & Muslih, M. A. H. (2025). Ekonomi Kelembagaan Dan Implikasinya Pada Pembangunan. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.

Rifandini, R. (2022). Kebijakan inovatif tata kelola air bersih desa melalui dinamika tipologi kelembagaan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 6(2), 83–94.

Sentanu, I. G. E. P. S. (2026). Ekonomi Politik dalam Dinamika Kebijakan dan Kekuasaan. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.

Susanti, I., IP, S., & AP, M. (2025). PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK. Penerbit Berseri.

Suwarno, I. E. (2025). Politik Kehutanan: Dinamika Kekuasaan, Regulasi, Dan Tata Kelola Indonesia. Penerbit Adab.

Wijaya, M. (2026). Revitalisasi Pembangunan Daerah: Inovasi, Kolaborasi dan Efisiensi dalam Manajemen Pemerintahan Daerah. CV Eureka Media Aksara.

Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., Puspitasari, R., Purwanto, E., Amsyari, I., & Islam, N. (2025). Collaborative Governance. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.